



RENCANA STRATEGIS 2016-2021 BADAN KESBANGPOL DAN MAS KAB. KUTAI KARTANEGARA



Rencana Strategis
2016-2021

Badan Kesbangpol dan Mas
Kab. Kutai Kartanegara
Jl. Awang Sabran, Bc.Hk No. G3
Tenggarong Telp. 0541-661518
Fax 0541-661518 Kode Pos 75514



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT

Jalan Drs. Awang Sabran, Bc. Hk. No. 3 G. Telp. (0541) 661518 Fax. 662602

T E N G G A R O N G

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 1.2 / / SK / BKBPM-19 / / 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka bagi setiap instansi Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing SKPD;
- b. bahwa dalam rangka kaitannya dengan implementasi Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah maka terjadi perubahan struktur organisasi pada setiap SKPD di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah perlu adanya perubahan sistematika dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Strategis Badan Kesbangpol dan Mas tahun 2016 – 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021, selanjutnya disebut RENSTRA Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun sejak 2016 sampai dengan 2021
- KETIGA : Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesbangpol dan Mas ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan akan dilakukan revisi apabila terdapat perubahan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : _____ 2016

Kepala Badan,



Drs. H. FATEKUR ROCHMAN, M.AP

Pembina Utama Muda

Nip. 19580505 198503 1 041



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat kanunianya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Dalam mendukung Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, maka Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara perlu membuat Rencana Strategis SKPD merupakan acuan penentuan program pada tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD ini secara garis besarnya mengupas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Didalam Renstra ini diharapkan dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi dan organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai urusan pemerintah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai implementasi dari RPJMD 2016-2021. Serta dapat mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antar



RENSTRA TAHUN 2016-2021

Pemerintah Kabupaten/Kota antara Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara disusun untuk menjadi arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai urusan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan Program Gerbang Raja (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera) Jilid II.

Tenggarong,

2016

Kepala Badan Kesbangpol dan Mas
Kabupaten Kutai Kartanegara,

Drs.H. FATEKUR ROCHMAN, M.AP

NIP. 19580505 198503 1 041



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	9
2.2 Sumber Daya SKPD	13
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD ..	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	29
3.3 Telaahan Renstra K/L	32
3.4 Telaahan Renstra SKPD Provinsi	34
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	40
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	40
4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD	44
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	50
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	57
BAB VII KAJIAN PELAKSANAAN	60
BAB VIII PENUTUP	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2011 – 2015 telah memberikan hasil dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, masih terdapat berbagai masalah penting yang harus segera diatasi sebagai tugas kedepan.

Permasalahan mendasar tersebut adalah penduduk miskin dan pengangguran yang jumlahnya masih cukup tinggi, tata ruang dan degradasi lingkungan, infrastruktur dan energi serta masalah pendidikan dan kesehatan, yang kesemuanya itu dapat menimbulkan eksek dalam penciptaan iklim yang kondusif.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga merupakan amanat dari



RENSTRA TAHUN 2016-2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah tahapan lima (5) tahun ketiga dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, yaitu “***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri dan Sejahtera***”.

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Untuk itu, tantangan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi perlu didukung dengan pemerataan pembangunan, yang diiringi dengan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan tetap terjaga situasi yang kondusif dalam rangka menunjang pembangunan.

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara khususnya di wilayah Kabupaten Kutai



Kartanegara dalam upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat NKRI.

Badan Kesbangpol dan Mas berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi dan organisasi politik, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Dalam mendukung Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, maka Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara perlu membuat Rencana Strategis SKPD merupakan acuan penentuan program pada tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai urusan pemerintah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Serta dapat mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten/Kota antara Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dalam mendukung pelaksanaan program Gerbang Raja Jilid II.



1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum mencakup :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 07 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013 - 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;



18. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2008 tentang Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 kedalam rencana aksi yang lebih konkrit, menjalankan tugas fungsi dan mencapai sasaran pembangunan SKPD yang diamanatkan dalam konstitusi menuju terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam arah kebijakan dan program serta kegiatan Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2016-2021;



2. Menyediakan satu acuan resmi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
4. Sebagai tolok ukur untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja dan mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD, mencakup : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.



RENSTRA TAHUN 2016-2021

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, mencakup :
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD,
Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih,
Telaahan Renstra K/L, Telaahan Renstra SKPD Provinsi, Penentuan
Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, mencakup : Tujuan dan
Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif.**

**Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD.**

Bab VII Kaidah Pelaksanaan.

Bab VIII Penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Gambaran pelayanan SKPD merupakan unsur penting dalam perencanaan layanan SKPD untuk memahami kondisi riil paling mutakhir dari organisasi yang akan menyusun rencana strategis sehingga perencanaan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual, khususnya menyangkut sumber daya internal organisasi dan kinerja layanan yang telah dicapai.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Masyarakat, dengan menjaga stabilitas daerah yang bebas dari ancaman dan gangguan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, serta Meningkatkan etika berpolitik, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta demokrasi dan jiwa nasionalisme.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijaksanaan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat;
- 2) Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat;
- 3) Perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
- 4) Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat;
- 6) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat; dan
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.



Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. sebagai berikut :

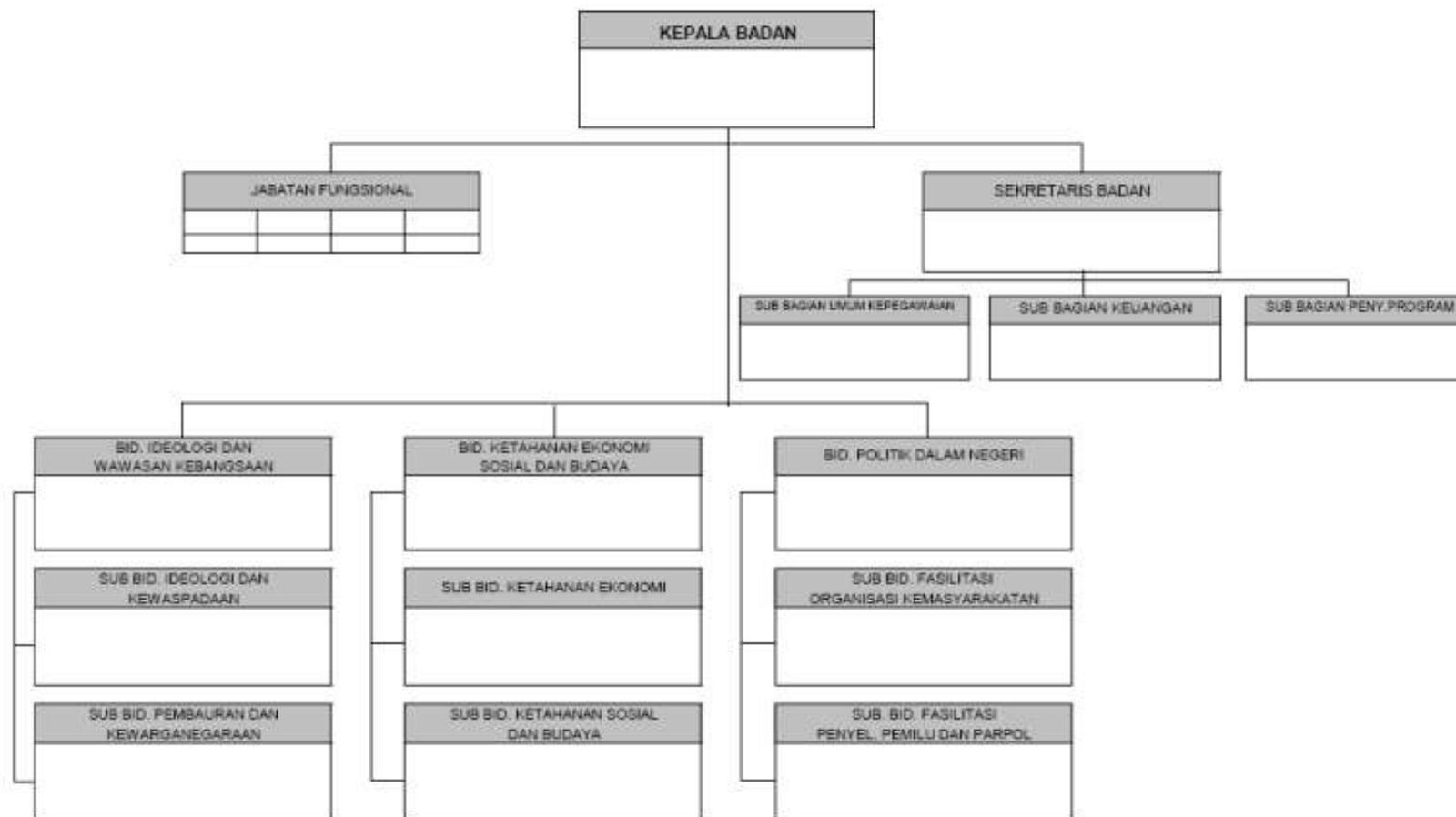
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Idiologi dan Kewaspadaan;
 - 2) Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan;
4. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya;
5. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
 - 2) Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Pemilu;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci struktur organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 09 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT**



**2.2 Sumber Daya SKPD**

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara per Agustus 2016 berjumlah 85 orang PNS yang terdiri dari 13 Pejabat Struktural dan 72 Non Struktural. Sedangkan tenaga kontrak harian lepas berjumlah 23 orang

Untuk jumlah jabatan struktural berjumlah pada Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 14 jabatan, dan per Desember 2013 jabatan yang terisi berjumlah 13 jabatan, 1 jabatan kosong karena meninggal dunia dan sampai sekarang belum terisi. Dan pada Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat Jabatan Fungsional. Data pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan Pangkat/Golongan dapat disampaikan sebagai berikut :

**DATA PEGAWAI
BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN**

No	Pendidikan	Gol IV			Gol III				Gol II				Gol I				Jumlah PNS	
		a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
1.	S2	3	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
2.	S1	1	2	-	5	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
3.	Diploma III	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4
4.	SLTA	-	-	-	-	2	-	1	20	23	8	-	-	-	-	-	-	54
5.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
6.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah		4	2	1	5	8	3	7	20	23	8	3	-	-	2	2	-	85

**DATA PEGAWAI
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN**

No	Data	Gol IV			Gol III				Gol II				Gol I				Jumlah PNS	
		a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D		
1.	PNS	4	2	1	5	8	3	7	20	23	8	3	-	-	2	2	-	85
Jumlah		4	2	1	5	8	3	7	20	23	8	3	-	-	2	2	-	85



**DATA PEJABAT STRUKTURAL
BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN**

No.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JABATAN STRUKTURAL				
		ESSELON				JUMLAH
		II.b	III.a	III.b	IV.a	
1.	S2	1	1	1	2	5
2.	S1	-	-	2	5	7
3.	Diploma III	-	-	-	-	0
4.	SLTA	-	-	-	1	1
5.	SLTP	-	-	-	-	0
6.	SD	-	-	-	-	0
Jumlah		1	1	3	8	13

Secara umum dalam menjalankan tugas pokok perlu didukung dengan sarana dan prasana, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SKPD Badan Kesbangpol dan Mas Kab. Kutai Kartanegara, cukup memadai dalam seluruh kegiatan operasional selama ini. Namun dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik. Adapun sarana dan prasarana pendukung yang di pandang perlu untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik, adalah sebagai berikut :

1. Perlu membangun system/aplikasi berbasis komputer dalam pengelolaan database yang terintegrasi, yang dapat mengelola data parpol, ormas dan potensi konflik ipoleksosbud yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
2. Kendaraan Operasional untuk pelaksanaan tugas ke wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan



3. Adapun sarana dan prasarana pada Badan Kesbangpol dan Mas sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun	Kondisi Barang
1	Kendaraan Roda Empat	8	2013	Baik
2	Kendaraan Roda Dua	33	2013	Baik
3	Mesin Foto Copy	1	2013	Baik
4	Filling Kabinet	10	2012	Baik
5	Lemari Besi	22	2016	Baik
6	Penghancur Kertas	2	2015	Baik
7	CCTV	4	2013	Baik
8	PC	31	2015	Baik
9	Printer	34	2015	Baik
10	UPS	20	2015	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

a. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, fasilitasi organisasi politik, organisasi masyarakat dan kelembagaan partai politik serta pemilihan umum.

Bidang ini juga melayani Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi organisasi kemasyarakatan, baik melalui manual maupun sistem online. Dan Rekomendasi pemberian hibah dan bansos kepada masyarakat yang sesuai dengan tupoksi, serta membantu fasilitasi dan verifikasi bantuan keuangan bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD

b. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan



Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengembangan ideologi dan wawasan kebangsaan.

Bidang ini membina forum-forum bentukan pemerintah seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) selain itu juga melayani pembuatan Surat Rekomendasi Penelitian dan Surat Keterangan Tidak Terlibat Dalam Kegiatan dan Organisasi Yang Mengkhianati NKRI (sebagai persyaratan bagi calon aparat desa)

c. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Bidang ini memfasilitasi dalam peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dan yang paling utama adalah permasalahan Narkoba.

A. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Periode pembangunan tahun 2010 s/d 2015, penyelenggaraan pembangunan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik, data yang dapat disajikan adalah data LPPD Kutai Kartanegara 2010-2015. Badan Kesbangpolmas telah melakukan upaya-upaya konkrit berupa pembinaan politik di daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain. Pembinaan terbanyak dilakukan adalah pada tahun 2015, pembinaan politik di daerah paling besar pada tahun 2015 yaitu sebesar 58 kegiatan, hal ini dilakukan dalam rangka



RENSTRA TAHUN 2016-2021

penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada tahun 2015, kegiatan ini telah membawa hasil yakni penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai serta legitimate. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD Badan Kesbangpolmas Kabupaten Kutai Kartanegara adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berkenaan, sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Permendagri Nomor 54 tahun 2010, sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini :



B. Analisis Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya kinerja Badan Kesbangpolmas akan dianalisis melalui pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kesbangpolmas Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2011 – 2015 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Dari total anggaran dan realisasinya dapat diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran Badan Kesbangpolmas sebagai berikut : Tahun 2011 sebesar 85,17 persen, tahun 2012 sebesar 86,00 persen, tahun 2013 sebesar 76,17 persen, tahun 2014 sebesar 86,29 persen, tahun 2015 sebesar 85,15 persen

**Anggaran dan Realisasi Anggaran Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara**

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Belanja Langsung	15.622.320.270	16.840.144.662	20.141.126.098	14.625.000.000	9.051.274.475	82,62	84,62	73,56	83,81	91,67
2	Realisasi	12.907.799.603	14.250.643.322	14.816.020.335	12.257.143.276	8.296.854.562					
3	Belanja Tidak Langsung	5.097.595.600	6.312.666.789	6.863.756.193	7.992.588.425	9.644.574.061	92,99	89,69	83,84	90,84	79,03
4	Realisasi	4.740.074.559	5.661.641.222	5.754.740.200	7.260.440.075	7.622.075.158					
5	Total BL + BTL	20.719.915.870	23.152.811.451	27.004.882.291	22.617.588.425	18.695.848.536	85,17	86,00	76,17	86,29	85,15
6	Total Realisasi BL + BTL	17.647.874.162	19.912.284.544	20.570.760.535	19.517.583.351	15.918.929.720					



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

A. Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi : Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menepisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum.

1) Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Karakteristik Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan, yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang rawan konflik, implementasi otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial/massa yang mengarah pada anarkhisme. Disamping itu, merosotnya etika dan moral bangsa yang ditandai dengan menguatnya fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan hambatan signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

2) Politisasi Nilai-Nilai Agama

Masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan masih terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama beberapa tahun



terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaan di dalam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Amat sering terjadi kekerasan dilakukan terhadap kelompok lain yang tidak sepaham, dengan menggunakan agama sebagai perisai. Namun yang perlu diperhatikan, berbicara soal keamanan dan ketertiban, tidak terlepas dari personalitas dari masyarakat yang kompleks. Bersatunya masyarakat didasari karena adanya kesamaan dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara yang di lindungi sepenuhnya oleh negara. Selain nilai-nilai agama, pluralism lainnya seperti budaya, adat istiadat, bahasa, ekonomi dan pendidikan mempunyai peran juga sebagai pemersatu atau sebagai ancaman.

3) Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum

Pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik dan hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme yang meluas, memunculkan berbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan terhadap dunia peradilan, antara lain berupa tuduhan "mafia peradilan" kepada dunia kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagai tritunggal penegak hukum Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberdayakan sektor masyarakat menuju ke arah terbentuknya masyarakat modern (*civil society*) yang tangguh. Dalam



hubungannya dengan masyarakat, pemerintah saat ini sedang mensosialisasikan perannya sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah (negara) sedang berada dalam proses transformasi dalam membentuk perannya sebagai “penengah” yang adil dalam mengupayakan penyelesaian berbagai konflik kepentingan dalam masyarakat yang majemuk ini.

4) Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif. Akan tetapi terdapat sebagian golongan dalam penyampaian aspirasi politiknya kadang di luar koridor hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan dan berpotensi memperkeruh situasi dan kondisi yang ada.

5) Perubahan Paradigma Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan dan tuntutan dinamika masyarakat, khususnya paradigma aparatur birokrasi memperlakukan publik pengguna layanan publik sebagai warga Negara (citizen) bukan sebagai pelanggan (customer). Dengan adanya perubahan perundang-undangan, terjadi pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula Sebagai “Promotor Pembangunan” berubah menjadi “Pelayan Masyarakat”. Perubahan diatas sejalan paradigma good governance yang memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan



publik. Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan hierarkis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang berkedudukan heterarkhis dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).

6) Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam mewujudkan harmoni sosial masyarakat, Pemerintah berupaya meningkatkan berbagai perangkat perundang-undangan/Peraturan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut baik terkait dengan program dan kegiatan maupun forum-forum masyarakat maupun instansi terkait yang membawa konsekuensi ke daerah untuk memfasilitasi kebijakan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

7) Program Pro-Masyarakat

Sejalan dengan tuntutan masyarakat pada era reformasi dan globalisasi maka program pembangunan kesatuan bangsa dan politik harus sejalan dengan kondisi dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Dalam menyikapi hal tersebut tentunya kegiatan pembinaan kesatuan bangsa dan politik harus mengarah kepada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.



B. Peluang

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan :

1) Peningkatan Persatuan dan Kesatuan

Peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat dilakukan dengan kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi dini atau *early warning system* untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh *stakeholders* bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia. Selain itu, perlunya penguatan terhadap masyarakat akan pemahamannya terhadap hak kewajiban masyarakat sebagai warga Negara Indonesia dalam kesatuan bangsa dan penguatan pemahaman “Bhineka tunggal Ika” sebagai slogan bangsa yang menjadikan kekuatan dalam kerangka kesatuan bangsa.



2) Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kaitan ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara Negara, utamanya lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik, memberdayakan dan menata lembaga-lembaga kemasyarakatan, mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi, serta melembagakan mekanisme kerjasama antar institusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.

3) Pemulihan Wilayah Pasca Konflik

Stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan *excess* dan *dispute* yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara



Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara.

4) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para *stakeholder* (Partai politik, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Penguatan dalam meningkatkan partisipasi politik melibatkan :

a. Partai Politik

Partai Politik berperan dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat;

b. Tokoh politik dan tokoh masyarakat

Para tokoh politik dan tokoh masyarakat diharapkan bisa memberikan teladan kepada masyarakat mengenai tata cara berpolitik yang baik, santun, penuh dedikasi dan loyalitas sehingga masyarakat tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

5) Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi

Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah beraneka ragam, termasuk didalamnya sistem religi atau sistem kepercayaan yang hidup dan diyakini oleh masyarakat. Dalam membangun sikap multikultural, maka upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleransi sosial tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.



6) Peningkatan Sumber Daya Manusia Bakesbangpol

Dalam menunjang kinerja SDM Bakesbangpol, perlu upaya-upaya peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harapan meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol yang handal dan profesional.

7) Peningkatan Anggaran

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya secara proporsional jumlah alokasi anggaran yang diperlukan dalam meningkatkan peran di area pembinaan tersebut.

8) Sarana dan Prasarana

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pembinaan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpolmas Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada Bab II, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	Tugas Pokok dan Fungsi, Standar Operasional Prosedur dan Standar	1. Merupakan Tupoksi	1. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tugas pokok dan fungsi serta keberadaan Badan	1. Distribusi penempatan pegawai yang belum merata pada setiap



		Pelayanan		Kesbangpol Kab. Kukar	bidang / bagian
	2. Masih kurangnya keamanan dan kenyamanan masyarakat		2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan	2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku	2. Belum adanya analisis kebutuhan beban kerja
	3. Masih rendahnya pemahaman wasbang masyarakat		3. Adanya rasa tanggung jawab yang cukup tinggi dalam menjalankan tugas dan rasa memiliki organisasi	3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	3. Belum tersedianya perangkat lunak (software) yang memadai secara khusus
	4. Masih tingginya jumlah kasus penyakit masyarakat				4. Belum adanya SOP mengenai tupoksi masing-masing pekerjaan
	5. Masih rendahnya partisipasi politik masyarakat				5. Perlunya sosialisasi keberadaan Kesbangpol kepada masyarakat



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021 maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

A. Visi

Adapun Visi berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”.

B. Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, berikut ini misi yang ditentukan sebagaimana terdapat pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021 yaitu :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten.
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah.
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah.
6. Meningkatkan Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2021, maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat akan mendukung pelaksanaan misi ke 1 yaitu **“Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat.”** Sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat memengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel sebagai berikut :

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”.

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat	Belum tersedianya sistem informasi pelayanan yang	Pengumpulan data dan analisis data terkait kebutuhan	Tersedianya SDM yang mampu menangani



		mudah diakses melalui internet	pengembangan sistem informasi	pelayanan secara online dan software serta aplikasi yang memadai
--	--	--------------------------------	-------------------------------	--

3.3 Telaahan Renstra Kemendagri Tahun 2015 – 2019

Visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2015 – 2019 adalah : **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”**

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut. Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 – 2019 tersebut adalah :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri



2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pementapan pelayanan publik
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari misi renstra Kemendagri tersebut yang sesuai dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah di misi ke 1 dan 5.



Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra K/L

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri	Masih kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	Persentase aparat dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpolmas Kab. Kukar	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	-

3.4 Telaahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim 2013 - 2018

Visi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 – 2018 adalah : ***“Terwujudnya Masyarakat Yang Damai, Tenram dan Demokratis, Serta Berwawasan Kebangsaan di Wilayah Kalimantan Timur”***



Dari visi Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim tersebut, maka visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat kesesuaian pada memberikan rasa aman dan kehidupan yang demokratis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut. Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 – 2018 tersebut adalah :

1. Mewujudkan sistem demokrasi yang kondusif di wilayah Kalimantan Timur
2. Mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan
3. Mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dalam menopang stabilitas nasional
4. Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan
5. Mewujudkan pelayanan yang optimal

Dari misi renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim tersebut yang sesuai dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah di misi ke 1 sampai dengan 5.



Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra SKPD Provinsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Pelayanan kepada masyarakat	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	Tugas pokok dan fungsi	Merupakan Tupoksi Badan Kesbangpolmas Kab. Kukar	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Struktur organisasi belum dapat memisahkan secara jelas tugas dan kegiatan masing-masing bidang, sehingga ada kegiatan yang tumpang tindih
			Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan		Distribusi penempatan pegawai yang belum merata pada setiap bidang/bagian
			Adanya rasa tanggungjawab yang cukup tinggi dalam menjalankan tugas dan rasa memiliki organisasi		Belum adanya analisis kebutuhan beban kerja sehingga penempatan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan beban kerja
	Masih rendahnya wawasan kebangsaan masyarakat				Belum tersedianya perangkat lunak secara khusus dalam penyediaan dan pengolahan data
	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masy. terhadap ket. sosial dan ekonomi				Belum adanya SOP mengenai tupoksi masing-masing pekerjaan
	Masih kurangnya ketentraman dan ketertiban masyarakat				Perlunya sosialisasi keberadaan Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim



					kepada masyarakat
	Masih belum optimalnya pelayanan kepada masy.				

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program Bupati dan Wakil Bupati, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- A. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan masyarakat tentang rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, rendahnya kualitas pelayanan umum
- B. Derasnya Aspirasi atau keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membentuk kabupaten-kabupaten baru (Kabupaten Kutai Pesisir dan Kabupaten Kutai Tengah) dalam bingkai pemekaran wilayah, hal ini akan memicu terjadinya konflik horisontal yang bisa mengganggu stabilitas daerah.
- C. Seringnya terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang dan perkebunan, kepemilikan lahan tumpang tindih yang sulit diselesaikan karena belum semua kecamatan mempunyai tapal batas



- yang valid, kemudian tidak terserapnya tenaga kerja lokal yang bisa menimbulkan konflik sehingga mengganggu iklim investasi
- D. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga banyak terdapat pulau-pulau kecil di pesisir pantai, sehingga bisa dimanfaatkan oleh teroris sebagai tempat persembunyian.
 - E. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat menimbulkan eksekusi degradasi moral yang bisa mengarah pada perubahan sosial budaya masyarakat yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - F. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan yang mengatasnamakan agama yang berdampak pada SARA.
 - G. Munculnya isu paham radikalisme di kalangan masyarakat, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara
 - H. Semakin meningkatnya permasalahan penyakit masyarakat seperti perjudian, prostitusi, peredaran uang palsu, pornografi, peredaran dan penyalahgunaan Obat-obatan terlarang (Narkoba).
 - I. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam cara penyampaian aspirasi, sehingga diperlukan peningkatan pendidikan politik masyarakat, sehingga dapat memanfaatkan saluran aspirasi.
 - J. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum, dengan tolok ukur tingkat partisipasi pemilih dan menurunnya Golput.



RENSTRA TAHUN 2016-2021

- K. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sebagai wadah kegiatan sehingga terjalin pola kemitraan dengan pemerintah dalam percepatan pembangunan.
- L. Penciptaan iklim demokratis dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Tahun 2018, Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021.





BAB IV
TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang lebih spesifik dan terukur. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan tersebut dirumuskan selaras dengan visi, misi dan prioritas yang akan dicapai. Sebagaimana visi dan misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021 ditetapkan tujuan sebagai berikut :

MISI 1 RPJMD	TUJUAN MISI 1 RPJMD	TUJUAN SKPD
1. Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat.	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya kinerja Sumber Daya Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat



		2. Terciptanya Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
		3. Meningkatnya Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
		4. Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah.

B. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).



Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

SASARAN RPJMD	SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN
1. Optimalnya akuntabilitas dan pengawasan daerah	1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kerja Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat.	Predikat Akuntabilitas Kinerja
2. Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	1. Berkurangnya potensi konflik di masyarakat	Tingkat Keamanan Wilayah
	2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	
	3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD****Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai
Kartanegara**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya kinerja Sumber Daya Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kerja Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terciptanya Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Berkurangnya potensi konflik di masyarakat						
	Meningkatnya Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	Tingkat Keamanan Wilayah	20%	40%	60%	80%	100%
	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah.	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat						



4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD

A. Strategi

Strategi Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan tahun 2016 – 2021, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat menggunakan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat.
2. Membangun komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta lembaga terkait.
3. Pemberian pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat
4. Pemberian pemahaman dan fasilitasi kepada masyarakat tentang pencegahan pemberantasan penyakit masyarakat
5. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi aparatur dan masyarakat



B. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka perlu ditetapkan suatu kebijakan sebagai berikut :

1. Membina dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat.
2. Memfasilitasi setiap gejolak dan masalah sosial dan konflik di masyarakat bersama dengan lembaga/instansi terkait baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Membina dan meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat
4. Meningkatkan sinergitas pemahaman dan fasilitasi tentang penanganan pencegahan pemberantasan penyakit masyarakat
5. Membina dan meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi aparatur dan masyarakat

Rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam tabel sebagai berikut :



RENSTRA TAHUN 2016-2021



RENSTRA TAHUN 2016-2021



RENSTRA TAHUN 2016-2021



RENSTRA TAHUN 2016-2021

**RANGKAIAN PERNYATAAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
BADAN KESBANGPOLMAS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KETERANGAN	
						TAHUN-2 (2017)	TAHUN-3 (2018)	TAHUN-4 (2019)	TAHUN-5 (2020)	TAHUN-6 (2021)	KONDISI		
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Meningkatnya kinerja Sumber Daya Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kerja Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Stabil
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Stabil
			Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%							100%	Stabil
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Stabil
			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Stabil
Terciptanya Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Berkurangnya potensi konflik di masyarakat	Tingkat Keamanan Wilayah	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Stabil
				Cakupan penanganan konflik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Stabil
				Cakupan penanganan gejolak masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Stabil
Meningkatnya Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	Tingkat Keamanan Wilayah	<i>Pengembangan wawasan kebangsaan</i>		100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	<i>Meningkat Pada....</i>	
				Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	<i>Meningkat Pada....</i>	
				Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	<i>Meningkat Pada....</i>	
		Tingkat Keamanan Wilayah	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah kasus penyakit masyarakat	224 kasus	220 kasus	210 kasus	205 kasus	200 kasus	190 kasus	190 kasus	<i>Menurun Pada....</i>	
<i>Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah</i>	<i>Meningkatnya partisipasi politik masyarakat</i>	<i>Tingkat Keamanan Wilayah</i>	<i>Pendidikan politik masyarakat</i>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<i>Meningkat Pada....</i>	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KETERANGAN
						TAHUN-2 (2017)	TAHUN-3 (2018)	TAHUN-4 (2019)	TAHUN-5 (2020)	TAHUN-6 (2021)	KONDISI	
						TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Partisipasi masyarakat dalam pemilu	58,75%	65%	67%	70%	71%	75%	75%	Meningkat Pada....
				Persentase ormas yang tertib administrasi	50%	70%	75%	80%	90%	100%	100%	Meningkat Pada....
				Persentase parpol yang tertib administrasi	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat Pada....

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
1	2	3	4	5	6
Misi 1 RPJMD : Memantapkan Reformasi Birokrasi Bagi Rakyat					
Meningkatnya kinerja Sumber Daya Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kerja Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat.	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat.	Membina dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
			Peningkatan disiplin aparatur		
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		
			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
Terciptanya Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Berkurangnya potensi konflik di masyarakat	Tingkat Keamanan Wilayah	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Membangun komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta lembaga terkait.	Memfasilitasi setiap gejala dan masalah sosial dan konflik di masyarakat bersama dengan lembaga/instansi terkait baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
			Pengembangan wawasan kebangsaan	Pemberian pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat	Membina dan meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila		Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Pemberian pemahaman dan fasilitasi kepada masyarakat tentang pencegahan pemberantasan penyakit masyarakat	Meningkatkan sinergitas pemahaman dan fasilitasi tentang penanganan pencegahan pemberantasan penyakit masyarakat
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Tingkat Keamanan Wilayah	Pendidikan politik masyarakat	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi aparatur dan masyarakat	Membina dan meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi aparatur dan masyarakat



BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat pada periode Renstra Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Berkurangnya Potensi Konflik di Masyarakat	1. Cakupan Penanganan Konflik	Kesbangpol, Kepolisian dan TNI
		2. Cakupan Gejolak Masyarakat	
2	Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	1. Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol dan Kepolisian
		2. Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		3. Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat	
3	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	1. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Kesbangpol dan KPU
		2. Persentase ormas yang tertib administrasi	
		3. Persentase parpol yang tertib administrasi	



Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan-kegiatannya;
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan-kegiatannya;
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan-kegiatannya;
4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dengan kegiatan-kegiatannya;
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan-kegiatannya;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan-kegiatannya;
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan-kegiatannya;
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan-kegiatannya;
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan-kegiatannya;

Adapun untuk lebih jelasnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KESBANGPOLMAS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
						TAHUN-1 (2016)		TAHUN-2 (2017)		TAHUN-3 (2018)		TAHUN-4 (2019)		TAHUN-5 (2020)		TAHUN-6 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)		
1	2	3	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya kinerja Sumber Daya Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kerja Aparatur dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.431.519.700	100%	1.400.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.550.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.650.000.000	100%	9.131.519.700	SEKRETARIAT	SKPD
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	4.076 lembar	1.000 lembar	4.800.000	1.000 lembar	4.800.000	1.000 lembar	4.800.000	1.000 lembar	4.800.000	1.000 lembar	4.800.000	1.000 lembar	4.800.000	6.000 lembar	28.800.000	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30 rekening	98 rekening	220.000.000	146 rekening	200.000.000	828 rekening	1.220.000.000	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	215 unit	42 unit	18.250.000	42 unit	18.250.000	42 unit	18.250.000	42 unit	18.250.000	42 unit	18.250.000	42 unit	18.250.000	252 unit	109.500.000	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	389 orang	336 orang/bulan	258.500.000	336 orang/bulan	258.500.000	336 orang/bulan	258.500.000	336 orang/bulan	258.500.000	336 orang/bulan	258.500.000	336 orang/bulan	258.500.000	2016 orang/bulan	1.551.000.000	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	377 unit	60 unit	27.000.000	60 unit	27.000.000	60 unit	27.000.000	60 unit	27.000.000	60 unit	30.000.000	60 unit	30.000.000	360 unit	168.000.000	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	249 item	27 item	42.134.980	27 item	40.615.280	27 item	40.615.280	27 item	42.615.280	27 item	42.615.280	27 item	42.615.280	162 item	251.211.380	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	37 cetakan	8 cetakan	50.000.000	8 cetakan	45.000.000	8 cetakan	45.000.000	8 cetakan	50.000.000	8 cetakan	50.000.000	8 cetakan	50.000.000	48 cetakan	290.000.000	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	9 item	226 buah	10.000.000	226 buah	10.000.000	226 buah	10.000.000	226 buah	15.000.000	226 buah	18.000.000	226 buah	20.000.000	1356 buah	83.000.000	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Bahan Bacaan dan 2. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan	40.447 eksemplar	12384 eksemplar	51.300.000	12384 eksemplar	46.300.000	12384 eksemplar	46.300.000	12384 eksemplar	51.300.000	12384 eksemplar	51.300.000	12384 eksemplar	51.300.000	74304 eksemplar	297.800.000	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	63 jenis barang	21 jenis barang	10.000.000	21 jenis barang	10.000.000	21 jenis barang	10.000.000	21 jenis barang	10.000.000	21 jenis barang	12.000.000	21 jenis barang	15.000.000	126 jenis barang	67.000.000	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	11.044 paket	318 paket	30.000.000	318 paket	30.000.000	318 paket	30.000.000	318 paket	43.000.000	318 paket	45.000.000	318 paket	45.000.000	1.908 paket	223.000.000	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	216 kali	216 o/h	400.000.000	216 o/h	400.000.000	316 o/h	500.000.000	316 o/h	500.000.000	316 o/h	530.000.000	316 o/h	565.000.000	1.696 o/h	2.895.000.000	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	24 orang	288 org/bln	249.534.720	288 org/bln	249.534.720	288 org/bln	249.534.720	288 org/bln	249.534.720	288 org/bln	249.534.720	288 org/bln	249.534.720	1.728 org/bln	1.497.208.320	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Khusus Hari-Hari Tertentu	32 item	32 item	60.000.000	32 item	60.000.000	32 item	60.000.000	32 item	80.000.000	32 item	90.000.000	32 item	100.000.000	192 item	450.000.000	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	527.800.000	100%	275.900.000	100%	350.000.000	100%	375.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	2.378.700.000	SEKRETARIAT	SKPD
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	2 unit	9 unit	47.841.400	0	0	0	10 unit	60.000.000	8 unit	40.000.000	10 unit	60.000.000	37 unit	207.841.400	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	222 unit	17 unit	207.158.600	0	25 unit	68.000.000	25 unit	33.000.000	0	23 unit	30.000.000	90 unit	338.158.600	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
						TAHUN-1 (2016)		TAHUN-2 (2017)		TAHUN-3 (2018)		TAHUN-4 (2019)		TAHUN-5 (2020)		TAHUN-6 (2021)		TARGET	(RP)		
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	2 unit gedung	2 unit gedung	45.011.200	2 unit gedung	48.000.000	2 unit gedung	50.000.000	2 unit gedung	50.000.000	2 unit gedung	70.000.000	2 unit gedung	70.000.000	2 unit gedung	333.011.200	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	251 unit	76 unit	197.900.000	76 unit	197.900.000	76 unit	200.000.000	76 unit	200.000.000	76 unit	250.000.000	76 unit	250.000.000	456 unit	1.295.800.000	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	200 unit	75 unit	29.888.800	75 unit	30.000.000	75 unit	32.000.000	75 unit	32.000.000	75 unit	40.000.000	75 unit	40.000.000	450 unit	203.888.800	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	100%	236.247.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	236.247.300	SEKRETARIAT	SKPD	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	216 stel	113 stel	116.247.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 stel	116.247.300	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD	
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	835 stel	114 stel	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 stel	120.000.000	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD	
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	150.000.000	100%	100.000.000	100%	109.180.000	100%	117.030.000	100%	125.500.000	100%	134.460.000	100%	736.170.000	SEKRETARIAT	SKPD
			Bimbingan Teknis Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta	82 orang	17 orang	150.000.000	10 orang	100.000.000	11 orang	109.180.000	12 orang	117.030.000	13 orang	125.500.000	14 orang	134.460.000	77 orang	736.170.000	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	SKPD
			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	285.000.000	100%	150.000.000	100%	163.770.000	100%	175.540.000	100%	188.240.000	100%	201.700.000	100%	1.164.250.000	SEKRETARIAT	SKPD
			Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	76 dokumen	5 dokumen	65.000.000	5 dokumen	40.000.000	5 dokumen	35.000.000	5 dokumen	45.000.000	5 dokumen	40.000.000	5 dokumen	50.000.000	30 dokumen	275.000.000	Kasub.Bag. Keuangan	SKPD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	Jumlah dokumen	36 dokumen	6 dokumen	170.000.000	6 dokumen	80.000.000	6 dokumen	80.000.000	6 dokumen	90.540.000	6 dokumen	90.000.000	6 dokumen	110.000.000	36 dokumen	620.540.000	Kasub.Bag. Penyusunan Program	SKPD
			Penyusunan Dokumen RENSTRA	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	50.000.000	Kasub.Bag. Penyusunan Program	SKPD	
			Penyusunan Dokumen Revisi RENSTRA	Jumlah dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	18.000.000	-	-	1 dokumen	20.240.000	-	2 dokumen	38.240.000	Kasub.Bag. Penyusunan Program	SKPD	
			Fasilitasi Manajemen Perubahan	Jumlah dokumen	n.a	-	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.770.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	38.000.000	1 dokumen	41.700.000	5 dokumen	180.470.000	Kasub.Bag. Penyusunan Program	SKPD	
Terciptanya Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan	Berkurangnya potensi konflik di masyarakat	Tingkat Keamanan Wilayah	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan penanganan konflik	100%	100%	1.090.000.000	100%	824.100.000	100%	900.000.000	100%	920.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.070.000.000	100%	5.804.100.000	Bidang Ideologi dan Wasbang dan Bidang Ket. Ekosobud	
			Fasilitasi Kewaspadaan di Daerah	Jumlah Dokumen Penanganan Konflik	10 dokumen	5 dokumen	250.000.000	25 dokumen	484.100.000	25 dokumen	520.000.000	25 dokumen	520.000.000	25 dokumen	520.000.000	25 dokumen	560.000.000	125 dokumen	2.604.100.000	Kasub.Bag. Idiologi dan Kewaspadaan	18 Kec.
			Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen	10 dokumen	5 dokumen	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 dokumen	250.000.000	Kasub.Bag. Idiologi dan Kewaspadaan	18 Kec.	
			Pemantauan Deteksi Dini di Daerah	Jumlah Titik Amatan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	560.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 Kecamatan	560.000.000	Kasub.Bag. Idiologi dan Kewaspadaan	18 Kec.	
			Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Terorisme	Jumlah peserta	300 orang	200 orang	180.000.000	100 orang	100.000.000	200 orang	180.000.000	200 orang	180.000.000	200 orang	180.000.000	200 orang	190.000.000	1.100 orang	1.010.000.000	Kasub.Bag. Idiologi dan Kewaspadaan	11 Kec.
			Rapat Koordinasi KOMINDA se-Kaltim	Jumlah peserta	-	-	150 orang	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	150 orang	90.000.000	Kasub.Bag. Idiologi dan Kewaspadaan	Kabupaten	
			Cakupan penanganan gejala masyarakat	Cakupan penanganan gejala masyarakat	100%	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	300.000.000	100%	320.000.000	100%	1.290.000.000	Bidang Ketahanan Ekosobud	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI	
						TAHUN-1 (2016)		TAHUN-2 (2017)		TAHUN-3 (2018)		TAHUN-4 (2019)		TAHUN-5 (2020)		TAHUN-6 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR				
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)			
			Pemantauan Dampak Kenaikan/Kelangkaan Harga dan Barang Pasar	Jumlah lokasi pemantauan	9 Kecamatan	18 Kecamatan	100.000.000	18 Kecamatan	150.000.000	18 Kecamatan	200.000.000	18 Kecamatan	220.000.000	18 Kecamatan	300.000.000	18 Kecamatan	320.000.000	18 Kecamatan	1.290.000.000	Kasub.Bag. Ket. Ekonomi	18 Kec.	
Meningkatnya Idologi dan Wawasan Kebangsaan	Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan	Tingkat Keamanan Wilayah	Pengembangan wawasan kebangsaan		100%	20%	4.453.000.000	20%	750.000.000	40%	672.950.000	60%	712.560.000	80%	813.740.000	100%	836.170.000	100%	8.238.420.000	Bidang Ideologi dan Wasbang dan Bidang Ket. Ekosobud		
			Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan		100%	20%	4.355.000.000	20%	500.000.000	40%	400.000.000	60%	420.000.000	80%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	6.675.000.000	Bidang Ideologi dan Wasbang		
			Pembinaan Pembauran dan Kewarganegaraan	Jumlah peserta	-	-	-	200 orang	180.000.000	100 orang	120.000.000	150 orang	160.000.000	200 orang	180.000.000	200 orang	180.000.000	850 orang	820.000.000	Kasub.Bag. Pembauran dan Kewarganegaraan	9 Kec.	
			Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah peserta	305 orang	160 orang	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 orang	180.000.000	Kasub.Bag. Pembauran dan Kewarganegaraan	2 Kec.	
			Pelatihan Tenaga Pelatih Pembauran Daerah	Jumlah peserta	100 orang	100 orang	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	300.000.000	Kasub.Bag. Pembauran dan Kewarganegaraan	1 Kec.	
			Sosialisasi penyelenggaraan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta	670 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Kasub.Bag. Pembauran dan Kewarganegaraan	
			Pembinaan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta	-	-	-	200 orang	180.000.000	200 orang	125.000.000	200 orang	135.000.000	175 orang	175.000.000	200 orang	170.000.000	975 orang	785.000.000	Kasub.Bag. Idiologi dan Kewaspadaan	10 Kec.	
			Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta	320 orang	200 orang	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 orang	450.000.000	Kasub.Bag. Idiologi dan Kewaspadaan	2 Kec.	
			Forum Dialog Pencegahan Ideologi Lain Terhadap Ideologi Pancasila	Jumlah peserta	275 orang	200 orang	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 orang	180.000.000	Kasub.Bag. Idiologi dan Kewaspadaan	2 Kec.	
			Peningkatan Pendidikan Wawasan	Jumlah peserta	200 orang	200 orang	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 orang	180.000.000	Kasub.Bag. Idiologi dan Kewaspadaan	2 Kec.	
			Penguatan Nilai Pancasila dan UUD 1945 serta Pengembangan Wawasan Kebangsaan dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kesadaran bernegara, jiwa kebangsaan dan semangat kebangsaan	Jumlah peserta	585 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Kasub.Bag. Idiologi dan Kewaspadaan	
			Sosialisasi Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	Jumlah peserta	325 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Kasub.Bag. Idiologi dan Kewaspadaan	
			Peningkatan Pengawasan Orang asing dan Lembaga Asing (NGO) di Daerah	Jumlah lokasi pengawasan	18 Kecamatan	18 Kecamatan	150.000.000	18 Kecamatan	70.000.000	18 Kecamatan	80.000.000	18 Kecamatan	50.000.000	18 Kecamatan	70.000.000	18 Kecamatan	70.000.000	18 Kecamatan	490.000.000	Kasub.Bag. Pembauran dan Kewarganegaraan	18 Kec.	
			Upacara Gerakan Nasional Bela Negara Dalam Rangka Peringatan Hari Bela Negara	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	70.000.000	1 kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	80.000.000	7 kegiatan	575.000.000	Kasub.Bag. Idiologi dan Kewaspadaan	Kabupaten	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
						TAHUN-1 (2016)		TAHUN-2 (2017)		TAHUN-3 (2018)		TAHUN-4 (2019)		TAHUN-5 (2020)		TAHUN-6 (2021)		TARGET	(RP)		
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)		
1	2	3	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Rapat Koordinasi Kesbangpol se - Kaltim	Jumlah peserta	150 orang	150 orang	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 orang	150.000.000	Kasub.Bag. Idiologi dan Kewaspadaan	Kabupaten
			Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama	Jumlah peserta	240 orang	240 orang	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 orang	250.000.000	Kasub.Bag. Pembauran dan Kewarganegaraan	3 Kec.
			Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta	320 orang	320 orang	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320 orang	350.000.000	Kasub.Bag. Pembauran dan Kewarganegaraan	4 Kec.
			Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah peserta	80 orang	80 orang	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 orang	450.000.000	Kasub.Bag. Idiologi dan Kewaspadaan	Kabupaten
			Bimtek Pemantauan Deteksi Dini (KOMINDA) Dasar dan Lanjutan	Jumlah peserta	70 orang	70 orang	1.515.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 orang	1.515.000.000	Kasub.Bag. Idiologi dan Kewaspadaan	Jakarta dan Bogor
				Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	20%	98.000.000	20%	250.000.000	40%	272.950.000	60%	292.560.000	80%	313.740.000	100%	336.170.000	100%	1.563.420.000	Bidang Ketahanan Ekosobud	
			Fasilitasi Ketahanan Budaya	Jumlah peserta	225 orang	80 orang	98.000.000	150 orang	125.000.000	150 orang	136.475.000	200 orang	146.280.000	200 orang	156.870.000	200 orang	168.085.000	980 orang	830.710.000	Kasub.Bag. Ket. Sosial dan Budaya	11 Kec.
			Fasilitasi Ketahanan Ekonomi di Daerah	Jumlah fasilitasi dan jumlah peserta	18 Kecamatan	-	-	18 kecamatan	125.000.000	150 orang	136.475.000	160 orang	146.280.000	200 orang	156.870.000	18 kecamatan	168.085.000	18 Kec. dan 510 orang	732.710.000	Kasub.Bag. Ket. Ekonomi	18 Kec.
			Penyuluhan Pemanfaatan Program KUR Kepada Masyarakat Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi	Jumlah Peserta	280 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasub.Bag. Ket. Ekonomi	-
			Penyuluhan Tentang Peran Serta Kelompok Tani dan Nelayan Terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Peserta	280 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasub.Bag. Ket. Ekonomi	-
			Penyuluhan Tentang Pemanfaatan Comdev Perusahaan Terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasub.Bag. Ket. Ekonomi	-
		Tingkat Keamanan Wilayah	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah kasus penyakit masyarakat	224 kasus	220 kasus	1.309.373.200	220 kasus	300.000.000	210 kasus	320.000.000	205 kasus	350.000.000	200 kasus	868.830.000	190 kasus	400.000.000	190 kasus	3.548.203.200	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di Bidang Sosial Budaya	Jumlah peserta	-	-	-	150 orang	100.000.000	200 orang	120.000.000	312 orang	250.000.000	550 orang	618.830.000	200 orang	200.000.000	1412 orang	1.288.830.000	Kasub.Bid. Ket. Sosial dan Budaya	14 Kec.
			Penyuluhan Pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta	900 orang	900 orang	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900 orang	750.000.000	Kasub.Bid. Ket. Sosial dan Budaya	9 Kec.
			Penyuluhan Pencegahan Eksploitasi Anak Bawah Umur	Jumlah peserta	450 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasub.Bid. Ket. Sosial dan Budaya	
			Pelaksanaan Tes Urine Bagi PNS Kab. Kukar	Jumlah peserta	113 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasub.Bid. Ket. Sosial dan Budaya	
			Penyuluhan Desa Bebas Narkoba	Jumlah peserta	100 orang	100 orang	140.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	140.000.000	Kasub.Bid. Ket. Sosial dan Budaya	1 Kec.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI	
						TAHUN-1 (2016)		TAHUN-2 (2017)		TAHUN-3 (2018)		TAHUN-4 (2019)		TAHUN-5 (2020)		TAHUN-6 (2021)		TARGET	(RP)			
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)			
1	2	3	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat di Bidang Ekonomi	Jumlah peserta				150 orang	100.000.000	150 orang	100.000.000							300 orang	200.000.000	Kasub.Bid. Ket. Ekonomi	4 Kec.	
			Penyuluhan Pencegahan Peredaran Uang Palsu	Jumlah peserta	880 orang	200 orang	169.373.200												200 orang	169.373.200	Kasub.Bid. Ket. Ekonomi	2 Kec.
			Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Tindak Penyelundupan	Jumlah peserta	450 orang																Kasub.Bid. Ket. Ekonomi	
			Penyusunan dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah dokumen		5 dokumen	250.000.000	5 dokumen	100.000.000	5 dokumen	100.000.000	5 dokumen	100.000.000	5 dokumen	250.000.000	5 dokumen	200.000.000	30 dokumen	1.000.000.000	Kasub.Bid. Ket. Sosial dan Budaya	18 Kec.	
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di	Meningkatnya partisipasi politik	Tingkat Keamanan Wilayah	Pendidikan politik masyarakat		100%	100%	1.665.000.000	100%	900.000.000	100%	1.115.490.000	100%	1.300.070.000	100%	901.980.000	100%	1.577.710.000	100%	7.460.250.000	Bidang Politik Dalam Negeri		
			Partisipasi masyarakat dalam pemilu		58,75%	65%	850.000.000	65%	500.000.000	67%	678.770.000	70%	831.970.000	71%	400.000.000	75%	1.039.830.000	75%	4.300.570.000	Bidang Politik Dalam Negeri		
			Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Jumlah peserta				400 orang	250.000.000						300 orang	200.000.000			700 orang	450.000.000	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	7 Kec.
			Pendidikan Politik Bagi Perempuan	Jumlah peserta	1.910 orang	300 orang	250.000.000												300 orang	250.000.000	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	3 Kec.
			Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah peserta	900 orang	300 orang	250.000.000												300 orang	250.000.000	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	3 Kec.
			Pendidikan politik bagi pelajar	Jumlah peserta																	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	
			Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah lokasi pemantauan perkembangan politik	18 Kecamatan	18 Kecamatan	350.000.000	18 Kecamatan	250.000.000	18 Kecamatan	278.770.000	18 Kecamatan	300.000.000	18 Kecamatan	200.000.000	18 Kecamatan	350.000.000	18 Kecamatan	1.728.770.000	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	18 Kec.	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum	Jumlah peserta dan Monev						300 orang dan 18 Kec.	400.000.000	600 orang dan 18 Kec.	531.970.000			900 orang dan 18 Kec.	689.830.000	1.800 orang dan 18 Kec.	1.621.800.000	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	18 Kec.	
			Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2018	Jumlah peserta																	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	
			Monitoring Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2018	Jumlah monev																	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	
			Sosialisasi Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019	Jumlah peserta																	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	
			Monitoring Tahapan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019	Jumlah monev																	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	
			Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar Tahun 2021	Jumlah peserta																	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	
			Monitoring Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Tahun 2021	Jumlah monev																	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	
			Persentase ormas yang tertib		50%	70%	410.000.000	70%	200.000.000	75%	218.360.000	80%	234.050.000	90%	250.990.000	100%	268.940.000	100%	1.582.340.000	Bidang Politik Dalam Negeri		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
						TAHUN-1 (2016)		TAHUN-2 (2017)		TAHUN-3 (2018)		TAHUN-4 (2019)		TAHUN-5 (2020)		TAHUN-6 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR			
						TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)	TARGET	(RP)		
1	2	3	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Fasilitasi, Verifikasi, dan Monev Hibah dan Bantuan Sosial Ormas	Jumlah Ormas Yang Difasilitasi dan diverifikasi	-	-	30 ormas	200.000.000	30 ormas	218.360.000	30 ormas	234.050.000	30 ormas	160.000.000	30 ormas	178.000.000	180 ormas	990.410.000	Kasub.Bid. Fas. Ormas	18 Kec.	
			Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas	440 ormas	30 ormas	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ormas	150.000.000	Kasub.Bid. Fas. Ormas	18 Kec.
			Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Ormas	Jumlah Ormas	400 ormas	30 ormas	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 ormas	60.000.000	Kasub.Bid. Fas. Ormas	18 Kec.
			Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas	Jumlah peserta	225 orang	225 orang	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 orang	200.000.000	Kasub.Bid. Fas. Ormas	3 Kec.
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas dan Hibah	Jumlah peserta	460 orang	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	90.990.000	100 orang	90.940.000	200 orang	181.930.000	Kasub.Bid. Fas. Ormas	2 Kec.	
				Persentase parpol yang tertib administrasi	50%	100%	405.000.000	100%	200.000.000	100%	218.360.000	100%	234.050.000	100%	250.990.000	100%	268.940.000	100%	1.577.340.000	Bidang Politik Dalam Negeri	
			Fasilitasi, Verifikasi dan Monev Bantuan Keuangan dan Kegiatan Partai Politik	Jumlah dokumen bankeu dan monev	-	-	-	8 dokumen bankeu dan 18 Kec.	200.000.000	8 dokumen bankeu dan 18 Kec.	218.360.000	8 dokumen bankeu dan 18 Kec.	234.050.000	8 dokumen bankeu dan 18 Kec.	250.990.000	8 dokumen bankeu dan 18 Kec.	268.940.000	48 dokumen bankeu dan 18 Kec.	1.172.340.000	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	Kabupaten
			Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah dokumen	32 dokumen bankeu	8 dokumen bankeu	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 dokumen bankeu	90.000.000	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	Kabupaten
			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Partai Politik	Jumlah monev	18 Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	
			Bimtek Bendahara Parpol dan Ormas	Jumlah peserta	50 orang	50 orang	165.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 orang	165.000.000	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	Kabupaten
			Pemutakhiran Data Parpol dan Ormas di Desa/Kelurahan	Jumlah dokumen	237 dokumen	70 dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 dokumen	150.000.000	Kasub.Bid. Fas. Parpol dan Pemilu	70 Desa/Kel.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program dan kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan indikator kinerja SKPD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Suatu indikator kinerja SKPD dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja SKPD sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome/hasil*) dari kegiatan (*output/keluaran*). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (*efek langsung*). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih



RENSTRA TAHUN 2016-2021

tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Penetapan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana Tabel berikut :



RENSTRA TAHUN 2016-2021

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA			RENSTRA SKPD							
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA			STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS RENSTRA
					INDIKATOR	TARGET				
						2016	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Berkurangnya potensi konflik di masyarakat	Cakupan penanganan konflik	100%	100%	Membangun komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta lembaga terkait.	Memfasilitasi setiap gejala dan masalah sosial dan konflik di masyarakat bersama dengan lembaga/instansi terkait baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
					Cakupan gejala masyarakat	100%	100%			
		Pengembangan wawasan kebangsaan			Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	20%	100%	Pemberian pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat	Membina dan meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat	Pengembangan wawasan kebangsaan
			Meningkatnya Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	20%	100%			
		Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat			Jumlah kasus penyakit masyarakat	224 kasus	190 kasus	Pemberian pemahaman dan fasilitasi kepada masyarakat tentang pencegahan pemberantasan penyakit masyarakat	Meningkatkan sinergitas pemahaman dan fasilitasi tentang penanganan pencegahan pemberantasan penyakit masyarakat	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
		Pendidikan politik masyarakat			Partisipasi masyarakat dalam pemilu	58,75%	75%	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi aparatur dan masyarakat	Membina dan meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi aparatur dan masyarakat	Pendidikan politik masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase ormas yang tertib administrasi	50%	100%					
			Persentase parpol yang tertib administrasi	50%	100%					



BAB VII

KAJIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021.

Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgent dalam peningkatan di bidang kesatuan bangsa dan politik selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode lima tahun, pada tahun 2016-2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good



RENSTRA TAHUN 2016-2021

governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.



BAB VIII
PENUTUP

Sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol dan Mas Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mempertahankan kesatuan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat NKRI.

Badan Kesbangpol dan Mas terutama berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah sebagai urusan pemerintah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Tenggarong,

2016

Kepala Badan Kesbangpol dan Mas
Kabupaten Kutai Kartanegara,

Drs.H. FATEKUR ROCHMAN, M.AP

NIP. 19580505 198503 1 041